

**ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DIKAITKAN DENGAN KINERJA
PEMERINTAH DAERAH**

(Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung)

Hassan Basrie, Universitas Bandar Lampung

Yashinta Arly, Universitas Bandar Lampung

Riswan, Universitas Bandar Lampung

Abstract

The purpose of this research is to analyze the financial statements associated with the performance of local government in the city of Bandar Lampung. The demands of public sector accountability towards the realization of good governance good governance in Indonesia is increasing. This demand is reasonable, because some research suggests that the onset of the economic crisis in Indonesia was caused by poor management (bad governance) and bad bureaucracy. Good governance is a management organization of development that is in line with the principle of democracy, the avoidance of any allocation of investment funds, the prevention of corruption both in administrative and political or the realization of good governance required competent human resources and in order to put together a quality financial statements so that the performance of local government in the city of Bandar Lampung can be the maximum. So the problem is taken is how financial statement analysis associated with the performance of local government in the city of Bandar Lampung.

Keywords : *financial statements, Performance, local government*

1. LATAR BELAKANG

Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat di dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia semakin meningkat. Tuntutan ini memang wajar, karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa terjadinya krisis ekonomi di Indonesia ternyata disebabkan oleh buruknya pengelolaan (*bad governance*) dan buruknya birokrasi. *Good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran dari salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politikal dan administratif.

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional

untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Kepemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang sentralistis, ketika pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetensi baik secara regional, nasional maupun internasional. Menanggapi paradigma baru tersebut maka pemerintah memberikan otonomi kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam suatu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Seiring dengan reformasi dibidang keuangan negara, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan diberbagai bidang untuk mendukung agar reformasi dibidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan dibidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing.

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan sesungguhnya dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan *good governance*. Alasannya adalah terpenuhinya tiga elemen *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Pertama, akuntabilitas karena adanya standar, pengungkapan efektifitas dan efisiensi APBN atau APBD menjadi bersifat kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, transparansi karena adanya standar, BPK menjadi mudah menyingkap tempat-tempat sembunyi korupsi karena mempunyai basis baku, mantap dan komprehensif dalam tugas pemeriksaan keuangan dan audit atas laporan keuangan. Ketiga, partisipasi karena dengan adanya standar, rakyat pada tiap daerah melalui DPRD makin mampu mengendalikan keuangan daerahnya.

SAP digunakan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal dan dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan. Tanpa adanya standar umum ini, maka laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah bisa jadi berbeda-beda antar daerah yang pada gilirannya akan memunculkan persoalan-persoalan baru pada level nasional. Oleh karena pentingnya SAP maka setiap penyajian laporan keuangan daerah harus mengikuti standar ini, meskipun pemerintahan belum sepenuhnya dapat mengikuti standar ini. Dalam penyajian laporan keuangan tidak terlepas dari faktor pendukung yaitu sumber daya manusia dan perangkat pendukungnya berupa infrastruktur, karena membantu dalam menyajikan laporan keuangan daerah.

Kinerja yang baik bagi suatu organisasi dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh organisasi yang bersangkutan dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efisien dan efektif. Konsep ekonomi, efisiensi dan efektifitas saling berhubungan satu sama lain dan tidak dapat diartikan secara terpisah. Konsep ekonomi memastikan bahwa biaya input yang digunakan dalam operasional organisasi dapat diminimalkan. Konsep efisien memastikan bahwa output yang maksimal dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia. Sedangkan konsep efektif berarti bahwa jasa yang disediakan/dihasilkan oleh organisasi dapat melayani kebutuhan pengguna jasa dengan tepat.

2. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTENSI

2.1 Keuangan Pemerintah

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*), pemerintah terus melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Usaha reformasi keuangan Negara mencakup bidang peraturan perundang-undangan, kelembagaan, sistem, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk dapat mencapai *good governance* diharapkan penyusunan dan penyajian laporan keuangan dapat berpedoman pada sebuah standar akuntansi dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan.

2.1.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam PP No. 24 tahun 2005. Laporan keuangan daerah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukannya. Laporan keuangan pemerintah daerah tersebut harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah :

- a. Masyarakat
- b. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa
- c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman
- d. Pemerintah

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2005 : 7), laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic
2. Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
3. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
4. Keseimbangan antargenerasi (*intergenerational equity*)
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pelaporan keuangan seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

2.1.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki :

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi dapat dikatakan relevan jika memiliki kriteria:

- Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- Tepat waktu
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- Lengkap
Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- Penyajian jujur
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan
- Dapat diverifikasi (*verifiability*)
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh
- Netralitas
Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2.1.4 Bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berikut ini adalah bentuk laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas yang masing-masing dapat diperbandingkan dengan anggarannya.

2. Catatan atas Laporan Keuangan

Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Catatan atas laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pihak tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan.

2.2 Pengertian Kinerja

Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Berdasarkan Keputusan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003, Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu instansi. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Indikator keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan tercermin dari laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, untuk merealisasikan keberhasilan tersebut tergantung pada:

1. Sumber daya manusia

sumber daya manusia adalah orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, pekerja, tenaga kerja, dan lain-lain.” Menurut Susilo (2002 : 3), “sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak organisasi dalam usaha mewujudkan visi, misi, dan tujuannya.

2. Perangkat pendukung

Perangkat pendukung utama yang dibutuhkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah perangkat pendukung teknis. Perangkat pendukung teknis adalah perangkat keras (hardware) berupa unit computer. perangkat keras adalah perlengkapan fisik yang digunakan untuk aktifitas input, pemrosesan, dan output dalam sebuah system informasi, sedangkan Perangkat lunak (software) yang digunakan adalah aplikasi khusus yang dinamakan program Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan selanjutnya secara otomatis mempersiapkan laporan keuangan daerah ketika laporan tersebut dibutuhkan. Pemerintahan daerah akan menyusun laporan keuangan daerah mengacu pada standar akuntansi yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pengukuran kinerja

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian sasaran, tujuan, misi dan visi melalui hasil-hasil yang ditampilkan beberapa produk, jasa ataupun proses pelaksanaan suatu kegiatan.

Tujuan Pengukuran Kinerja

Tujuan sistem pengukuran kinerja:

1. Mengkomunikasikan strategi secara lebih baik.
2. Menyeimbangkan ukuran kinerja finansial & non-finansial.
3. Mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah, serta memotivasi pencapaian *goal congruence*.
4. Alat mencapai kepuasan individu maupun kolektif yang rasional.

Manfaat Pengukuran Kinerja

Manfaat pengukuran kinerja:

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja.
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Memonitor & mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
4. Dasar memberikan reward & punishment secara objektif yang diukur dengan ukuran kinerja yg disepakati.
5. Alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif

2.3 Hubungan Laporan Keuangan Terhadap Kinerja

Laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan dalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya.

Meskipun saat ini Indonesia banyak dilakukan persiapan dan diskusi mengenai *good governance*, namun jika dicermati lebih lanjut, tampak bahwa akuntabilitas pemerintahan di Indonesia masih berfokus hanya dari sisi pengelolaan keuangan negara. Sedangkan dalam kenyataan sehari-hari keingintahuan masyarakat tentang akuntabilitas pemerintahan tidak dapat dipenuhi hanya oleh informasi keuangan saja.

Tujuan pemerintah adalah melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan sendirinya dipenuhi dengan menyampaikan informasi yang relevan kepada wakil rakyat dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang memang ingin menilai kinerja pemerintah. Karena melalui informasi tersebut masyarakat dapat melihat bagaimana kinerja suatu organisasi pemerintahan. Dengan demikian apabila terdapat kinerja yang kurang baik dalam organisasi tersebut kita dapat langsung mengetahui dan akan lebih mudah untuk diatasi, karena laporan keuangan menyajikan informasi tentang hal-hal tersebut.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian yang diteliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung yang beralamat di Jl. Dr. Susilo No. 2, Bandar Lampung.

3.2 Jenis Data

Adapun data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung yang memerlukan pengolahan lebih lanjut dan dikembangkan dengan pemahaman sendiri oleh penulis.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang sudah diolah yang bersumber dari kantor pemerintahan yang diteliti, misalnya sejarah singkat Pemerintahan Kota Bandar Lampung, luas wilayah, jumlah penduduk, dan informasi yang berhubungan dengan kualitas laporan keuangan terhadap kinerja pemerintah.

3.3 Metode Penelitian

Untuk memperoleh data dan bahan yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan instrument atau alat pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian yang diarahkan untuk pengumpulan landasan teori yang akan digunakan dalam melakukan analisa. Dimana penelitian ini dilakukan dengan mempelajari literature dan sumber-sumber pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara kunjungan langsung objek penelitian. Adapun dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- Wawancara

Yaitu melakukan tanya jawab langsung secara lisan dengan beberapa pihak yang berkompeten dan berwenang dalam memberikan data yang dibutuhkan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung

- Observasi

Yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian, mencatat data atau dokumen serta informasi yang dikaitkan dengan pembahasan skripsi guna memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kinerja pemerintah daerah Kota Bandar Lampung.

- Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan melihat data-data yang ada dalam pemerintahan seperti laporan keuangan pemerintah Kota, hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah kota Bandar Lampung tahun 2009.

3.4 Definisi Operasional

1. Variabel bebas (variable x)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi. Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah laporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam

rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukannya.

2. Variabel terikat (variable y)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi, atau yang menjadi akibat adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah kinerja yang merupakan suatu gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu instansi.

3.5 Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga memberi keterangan yang benar dan lengkap untuk pemecahan masalah yang dihadapi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil atau Temuan Penelitian

4.1.1 Laporan Keuangan

**Pemerintah Kota Bandar Lampung
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2008**

Dalam Rupiah

Uraian	Anggaran	REALISASI
Pendapatan daerah	725,597,468,445.85	747,982,275,503.92
Pendapatan asli daerah	60,422,775,028.70	67,661,519,021.92
Pendapatan pajak daerah	36,390,400,000.00	42,841,374,876.00
Pendapatan retribusi daerah	15,665,936,560.00	14,414,767,716.00
Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	2,353,554,978.10	2,509,144,000.00
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	6,012,883,490.63	7,896,232,429.92
Pendapatan transfer	663,699,693,417.15	668,092,971,938.00
Transfer pemerintah pusat-dana perimbangan	624,655,631,997.67	634,760,315,463.00
Dana bagi hasil pajak	55,057,848,074.00	55,199,728,758.00
Dana bagi hasil sumber daya alam	17,438,766,293.67	27,401,569,705.00
Dana alokasi umum	509,474,017,000.00	509,474,017,000.00
Dana alokasi khusus	42,685,000,000.00	62,685,000,000.00
Transfer pemerintah pusat-lainnya	9,252,506,800.00	0.00
Dana penyesuaian	9,252,506,800.00	0.00
Transfer pemerintah provinsi	29,791,554,619.48	33,332,656,475.00
Pendapatan bagi hasil pajak	29,791,554,619.48	33,177,754,000.00
Pendapatan bagi hasil lainnya	0.00	154,902,475.00
Lain-lain pendapatan daerah sah	1,475,000,000.00	
Dana penyesuaian	0.00	8,550,506,800.00
Pendapatan hibah	375,000,000.00	2,577,277,744.00

Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
Daerah lainnya		
Jumlah pendapatan	725,597,468,445.85	747,982,275,503.92
Belanja	781,189,330,424.37	778,777,514,052.53
Belanja operasi	637,933,381,695.94	652,412,631,034.53
Belanja pegawai	427,074,379,239.39	443,683,563,245.54
Belanja barang	170,640,645,975.00	153,978,552,125.00
Belanja bunga	188,482,904.55	110,248,706.99
Belanja hibah	30,260,373,577.00	45,015,241,957.00
Belanja bantuan	9,769,500,000.00	9,625,025,000.00
Belanja modal	141,513,062,685.00	124,903,058,018.00
Belanja modal pengadaan tanah	6,970,000,000.00	3,459,905,274.00
Belanja modal peralatan dan mesin	23,766,272,385.00	23,364,189,500.00
Belanja modal gedung dan bangunan	32,037,991,000.00	33,136,279,100.00
Belanja jalan irigasi dan jaringan	56,887,797,400.00	55,229,487,700.00
Belanja modal aset tetap lainnya	5,732,019,000.00	9,713,196,444.00
Belanja modal aset lainnya	16,118,982,900.00	0.00
Belanja tak terduga	607,486,043.43	346,425,000.00
Belanja tak terduga	607,486,043.43	346,425,000.00
Transfer	1,135,400,000.00	1,115,400,000.00
Transfer bagi hasil kepada provinsi/kab/kota dan	1,135,400,000.00	1,115,400,000.00
Pemerintah desa		
Jumlah belanja	781,189,330,424.37	778,777,514,052.53
Surplus/ (defisit)	(55,591,861,978.52)	(30,795,238,548.61)
Pembiayaan		
Penerimaan pembiayaan	63,785,362,193.52	63,785,362,193.52
Penggunaan silpa	63,785,362,193.52	63,785,362,193.52
Pengeluaran pembiayaan	8,193,500,215.00	6,560,905,583.41
Dana bergulir	0.00	250,000,000.00
Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	3,000,000,000.00	2,957,000,000.00
Pembayaran pokok hutang	5,193,500,215.00	3,353,905,583.41
Jumlah pembiayaan	55,591,861,978.52	57,224,456,610.11
Sisa lebih pembiayaan anggaran	(0.00)	26,429,218,061.50

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2008

4.1.2 Neraca

**Pemerintah Kota Bandar Lampung
Neraca
Per 31 Desember 2007 Dan 2008**

Dalam Rupiah

No.	Uraian	2007	2008
1	Aset		
2	Aset Lancar		

3	Kas Di Kas Daerah	68.261.768.957,76	26.259.086.990,41
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.023.576.332,00	201.444.058,29
5	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	16.440.768,00
6	Piutang Pajak	402.192.281,00	0,00
7	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	137.350.000,00	465.994.000,00
8	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	48.694.000,00	47.694.600,00
9	Piutang Lain-lain	6.530.104.059,00	12.172.015.740,00
10	Persediaan	4.903.377.457,38	6.062.223.202,90
11	Jumlah Aset Lancar	81.307.063.087,14	45.224.899.359,60
	Investasi		
12	Investasi Non Permanen		
13	Dana Bergulir	0,00	7.700.000.000,00
14	Jumlah Investasi Non Permanen	0,00	7.700.000.000,00
15	Investasi Permanen		
16	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	13.644.604.375,84	23.311.479.376,69
17	Jumlah Investasi Permanen	13.644.604.375,84	23.311.479.376,69
	Jumlah Investasi	13.644.604.375,84	31.011.479.376,69
18	Aset Tetap		
19	Tanah	670.321.248.001,00	714.456.954.895,00
20	Peralatan dan Mesin	96.993.059.383,00	118.167.898.883,00
21	Gedung dan Bangunan	324.466.071.198,00	360.276.230.298,00
22	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	384.550.975.125,00	439.867.670.925,00
23	Aset Tetap Lainnya	8.997.645.554,00	14.545.941.998,00
24	Konstruksi dalam Pengerjaan	1.361.088.100,00	402.039.000,00
25	Jumlah Aset Tetap	1.486.690.087.361,00	1.647.716.735.999,00
26	Aset Lainnya		
27	Aset Lain-Lain	6.500.000.000,00	12.224.455.537,59
28	Jumlah Aset Lainnya	6.500.000.000,00	12.224.455.537,59
29	Jumlah Aset	1.588.141.754.823,98	1.736.177.570.272,88
30	Kewajiban		
31	Kewajiban Jangka Pendek		
32	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (Pfk)	5.499.983.096,24	31.312.987,20
33	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	418.829.854,00	418.829.854,00
34	Hutang Bunga Pemerintah Pusat	110.248.706,99	0,00
35	Hutang Jangka Pendek Lainnya	2.322.919.590,74	103.191.122,29
36	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	8.351.981.247,97	553.333.963,49
37	Kewajiban Jangka Panjang		
38	Hutang kepada Pemerintah Pusat	858.188.496,00	439.358.642,00
39	Hutang Bunga	103.454.839,75	0,00

40	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	961.643.335,75	439.358.642,00
41	Jumlah Kewajiban	9.313.624.583,72	992.692.605,49
42	Ekuitas Dana		
43	Ekuitas Dana Lancar	71.286.590.007,16	44.671.565.396,11
44	Ekuitas Dana Investasi	1.505.873.048.401,09	1.690.513.312.271,28
45	Ekuitas Dana Donasi	1.668.491.832.01	0,00
46	Jumlah Ekuitas Dana	1.578.828.130.240,26	1.735.184.877.667,39
47	Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas Dana	1.588.141.754.823,98	1.736.177.570.272,88

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2008

4.1.3 Laporan Arus Kas

**Pemerintah Kota Bandar Lampung
Laporan Aliran Arus Kas
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2008**

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2008
1	Arus kas dari aktivitas operasi	
2	Arus kas masuk	
3	Pendapatan pajak daerah	39,265,916,881.00
4	Pendapatan retribusi daerah	14,414,767,716.00
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	2,509,144,000.00
6	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	7,352,016,029.92
7	Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak	55,199,728,758.00
8	Dana bagi hasil sumber daya alam	27,401,569,705.00
9	Dana alokasi umum	509,474,017,000.00
10	Dana alokasi khusus	42,685,000,000.00
11	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	8,550,506,800.00
12	Dan bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	33,332,656,475.00
13	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	1,100,000,000.00
14	Jumlah arus kas masuk	741,285,323,364.92
15	Arus kas keluar	
16	Belanja pegawai	443,683,563,245.54
17	Belanja barang	147,825,816,386.00
18	Bunga	110,248,706.99
19	Hibah	45,015,241,957.00
20	Bantuan	9,625,025,000.00
21	Belanja tidak terduga	346,425,000.00
22	Belanja bagi hasil kepada provinsi/kab/kota dan pemerintah desa	1,115,400,000.00
23	Total arus kas keluar	647,721,720,295.53
24	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	93,563,603,069.39
25	Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	

26	Arus kas masuk	
27	Pendapatan dari penjualan aktiva tetap	530,356,000.00
28	Pendapatan dari penjualan aktiva lainnya	13,860,400.00
29	Total arus kas masuk	544,216,400.00
30	Arus kas keluar	
31	Belanja tanah	3,459,905,274.00
32	Belanja peralatan dan mesin	23,364,189,500.00
33	Belanja gedung dan bangunan	33,136,279,100.00
34	Belanja jalan, irigasi dan jaringan	55,229,487,700.00
35	Belanja aset tetap lainnya	9,713,196,444.00
36	Total arus kas keluar	124,903,058,018.00
37	Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan	(124,358,841,618.00)
38	Arus kas dari aktivitas pembiayaan	
39	Arus kas masuk	0.00
40	Total arus kas masuk	0.00
41	Arus kas keluar	
42	Pembayaran pokok pinjaman kepada pemerintah pusat	2,693,500,214.74
43	Pembayaran pinjaman dalam negeri lainnya	660,405,368.67
44	Pengeluaran penyertaan modal pemerintah daerah	2,957,000,000.00
45	Pemberian pinjaman dana bergulir	250,000,000.00
46	Total arus kas keluar	6,560,905,583.41
47	Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan	(6,560,905,583.41)
48	Arus kas dari aktivitas non-anggaran	
49	Arus kas masuk	
50	Penerimaan perhitungan pihak ketiga	61,967,813,791.00
51	Arus kas keluar	
52	Pengeluaran perhitungan pihak ketiga	67,436,483,900.00
53	Arus kas bersih dari aktivitas non-anggaran	(5,468,670,019.00)
54	Kenaikan/ penurunan kas	(42,824,814,241.02)
55	Saldo awal kas	69,285,345,289.72
56	Saldo akhir kas	26,460,531,048.70

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2008

4.2 PEMBAHASAN

4.2.1 Analisis Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perhitungan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam satu tahun anggaran baik pada kelompok pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Realisasi anggaran tahun 2008 ini disusun berdasarkan jumlah realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dibandingkan dengan masing-masing anggarannya sesuai dengan APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2008. Jumlah angka yang tercantum dalam laporan realisasi anggaran ini mencakup semua penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja serta pembiayaan yang masuk kedalam atau dikeluarkan dari bendahara umum daerah, khusus untuk pengeluaran

pengisian kas yang diberikan kepada pemegang kas, realisasinya didasarkan atas pengesahan pertanggungjawaban. Tujuan laporan realisasi anggaran adalah menyajikan informasi mengenai kemampuan merealisasikan pendapatan dari yang dianggarkan, melaksanakan kegiatan berdasarkan anggaran belanja yang ditetapkan, dan sumber-sumber pembiayaan yang digunakan untuk mengalokasikan surplus atau menutup defisit.

Pada laporan realisasi anggaran Kota Bandar Lampung menyajikan rekening pendapatan, belanja, pembiayaan dan realisasinya. Walaupun dalam prakteknya sering kali realisasinya jauh lebih besar atau lebih kecil dari yang dianggarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung .

Neraca daerah merupakan salah satu dari laporan keuangan daerah. Neraca daerah menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, utang, dan ekuitas dana pada akhir tahun anggaran. Pemerintahan Kota Bandar Lampung menyusun neraca dengan mengumpulkan, menganalisis, mencatat anggaran dan realisasinya ke dalam pos-pos neraca.

Arus kas diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) aktivitas antara lain :

1. Aktivitas operasi

Merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai kegiatan operasional yang bersumber dari arus kas masuk pada tahun anggaran 2008 di luar pinjaman dan sisa lebih perhitungan anggaran yang lalu. Aktivitas investasi.

2. Aktivitas pembiayaan

Menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan surplus atau defisit anggaran pada tahun 2008 ini dapat dilihat dimana tidak ada arus masuk kas.

Analisis Laporan Keuangan dikaitkan dengan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.

Kinerja pemerintah kota Bandar Lampung dapat dilihat dari hasil laporan keuangan. Kinerja pemerintahan yang maksimal dapat dilihat dari laporan realisasi anggaran, dengan membandingkan realisasi dan anggarannya. Jika dilihat dari jumlah pendapatan, maka pencapaiannya melebihi target sebesar 103,09% tetapi dilihat dari total belanja tidak sesuai target karena pencapaian hanya 96,69%. Sehingga dapat dikatakan kinerja pemerintah kota Bandar Lampung tahun 2008 sudah baik, karena pendapatan sudah melebihi target dan dilihat dari total belanja terjadi penghematan anggaran sebesar 3,31%. Analisa laporan neraca menunjukkan bahwa total asset dan ekuitas dana pemerintah kota Bandar Lampung mengalami kenaikan 9,32% dan 9,90%, sedangkan kewajiban mengalami penurunan. Sehingga pada tahun 2008 pemerintah kota Bandar Lampung mengurangi porsi kewajibannya, tetapi asset masih menunjukkan kenaikan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan pada tahun anggaran 2008, kinerja Pemerintahan Kota Bandar Lampung yang dihasilkan belum maksimal karena masih ditemukan kurangnya rasa tanggung jawab SDM-nya terhadap tugas yang dibebankan.

2. Dari pembahasan analisis laporan keuangan menunjukkan:
 - a) Dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran, menunjukkan bahwa anggaran defisit sebesar Rp. 55.591.861.978,52 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 30.795.238.548,61 berarti kinerja pemerintah sudah cukup baik dikarenakan jumlah pendapatan telah melebihi target yang telah dianggarkan, dengan pencapaian sebesar 103,09% dengan anggaran sebesar Rp. 725.597.468.445,85 dan realisasinya sebesar Rp. 747.982.275.503,92. Selain itu, jumlah belanja tidak mencapai target yang telah dianggarkan, dengan pencapaian sebesar 96,69% dengan anggaran sebesar Rp. 781.189.330.424,37 dan realisasinya sebesar Rp. 778.777.514.052,53 sehingga akan mengurangi defisit anggaran.
 - b) Dilihat dari Neraca, menunjukkan bahwa jumlah aset mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 1.588.141.754.823,98 menjadi Rp. 1.736.177.570.272,88, sedangkan kewajiban mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 9.313.624.583,72 menjadi Rp. 992.692.605,49 dan jumlah ekuitas dana mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.578.828.130.240,26 menjadi Rp. 1.735.184.877.667,39
 - c) Dilihat dari Laporan Arus Kas, menunjukkan bahwa jumlah arus kas mengalami penurunan kas sebesar Rp. 42.824.814.241,02

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pada tahun anggaran berikutnya, hendaknya kinerja Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat lebih baik lagi dengan melakukan berbagai upaya untuk menjamin terpeliharanya kondisi yang mantap, aman, dan kondusif sehingga tuntutan masyarakat yang menghendaki
2. transparansi, akuntabilitas, dan pemerintahan yang bebas KKN dapat terwujud.
3. Berdasarkan hasil pembahasan analisis laporan keuangan, maka disarankan agar Pemerintah Kota Bandar Lampung meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan cara meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan sehingga SDM dapat mampu menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP.

DAFTAR PUSTAKA

Arif, Bahtiar dkk, 2002. *Akuntansi Pemerintahan*, Salemba Empat, Jakarta.

Bastian, Indra, 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*, Salemba Empat, Jakarta.

-----, 2006, *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta.

-----, 2007, *Audit Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.

Erlina dan Sri Mulyani, 2007. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*.
USU Press, Medan.

Erlina, 2008. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah*.
USU Press, Medan.

Forum Diskusi Akuntansi Sektor Publik, 2006. *Standar Akuntansi Pemerintahan Telaah Kritis-PP No. 24 Tahun 2005*. BPFE, Yogyakarta.

- Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- , 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3*, Salemba Empat, Jakarta.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo, 2004. *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta.
- Nawawi, Hadari, 2001. *Perencanaan Sumber Daya Manusia untuk Organisasi Profit yang Kompetitif*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nordiawan, Deddy, 2006. *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- Susilo, 2002. *Audit Sumber Daya Manusia*, Penerbit Gema Amini, Jakarta.
- Ulum, Iyahul MD, 2004. *Akuntansi Sektor Publik Sebuah Pengantar, Edisi Pertama*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Republik Indonesia, 2002. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002. *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta.
- , 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta.